



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
UNIT KERJA : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SUB UNIT KERJA : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARWOTO**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **422649**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.615.000.000**

1. Tanah Seluas 265 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 763.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 4 m2/4 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 4 m2/4 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 4 m2/4 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 4 m2/4 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/90 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 127.000.000
7. Tanah Seluas 160 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
8. Tanah Seluas 180 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 120.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 13 G / MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TR / SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA NC12A1CF A/T / SOLO Tahun 2012, HASIL



SENDIRI Rp. 8.000.000

4. MOTOR, HONDA NC118F1D AT / SOLO Tahun 2013, HASIL

SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	239.046.350
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	33.846.671
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.007.893.021
III. HUTANG	Rp.	232.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.775.893.021

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.